



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERHUBUNGAN  
TAHUN 2016 - 2020

KABUPATEN LUWU TIMUR

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Urusan Perhubungan Tahun 2016-2021 yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Sektor Perhubungan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat. Sejalan dengan review internal terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Dinas Perhubungan terdahulu, maka dilakukan perbaikan agar Renstra Dinas Perhubungan dapat sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur.

Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran. Renstra 2016-2021 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada Urusan Perhubungan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan.

Penyusunan Renstra ini didasarkan kepada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021.
2. Renstra Dinas Perhubungan terdahulu.
3. Cascading Kinerja Dinas Perhubungan sebagai salah satu hasil review internal.
4. Serta Dokumen pendukung lainnya.

Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016–2021 ini menjadikan arah proses pembangunan di bidang Perhubungan di Kabupaten Luwu Timur lebih terarah.

Malili, September 2020

Kepala Dinas



**Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650406 198603 1 017

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang	Hal 1
2. Landasan Hukum	Hal 2
3. Maksud dan Tujuan	Hal 3
4. Sistematika Penulisan	Hal 4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Perangkat PD	Hal 8
2. Sumber Daya PD	Hal 11
3. Kinerja Pelayanan PD	Hal 12
4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	Hal19
<b>BAB III PERMASALAHAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Hal 24
2. Telaah Visi, Misi, dan Program kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih	Hal 27
3. Telaah RENSTRA kementerian Perhubungan dan RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi	Hal 33
4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup	Hal 37
5. Penentuan Isu-Isu Strategis	Hal 41
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>Hal 43</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>Hal 45</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>Hal 47</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>Hal 70</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	<b>Hal 75</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan hal yang sangat diperlukan untuk memajukan suatu bangsa dan menilai berhasilnya suatu pemerintahan. Untuk menjalankan pembangunan tersebut sangatlah diperlukan perencanaan yang menurut ilmu manajemen diartikan sebagai suatu proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan dalam suatu organisasi merupakan suatu proses awal yang saling berkaitan dengan proses-proses berikutnya karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain [pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan ] tidak akan dapat berjalan.

Rencana Strategis PD yang selanjutnya disingkat RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 Tahun. Penyusunan RENSTRA merupakan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan NASional dimana disebutkan bahwa Penyusunan RENSTRA berpedoman kepada rencana Strategis[RENSTRA] PD dan mengacu kepada RPJMD, memuat kebijakan, Program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah manapun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RENSTRA mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, karena RENSTRA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah [RPJMD]. RENSTRA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan lebih konkrit dan terukur.

RENSTRA PD merupakan perencanaan 5 tahun yang mengacu pada RPJMD kabupaten yang memuat tentang Strategi dan kebijakan yang tertuang dalam program dan kegiatan prioritas seperti yang tertuang dalam rancangan awal RPJMD.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan RENSTRA Tahun 2016-2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Adalah Sebagai Berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan Restribusi Daerah;
4. Undang-undang 23 Tahun 2015 tentang pemerintah Dearah;
5. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang tentang pengelolaan keuangan Daerah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuanagan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang palaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan Tata cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
9. Peraturan dearah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana pembangunan jangka panjang [RPJP] kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 [Lembaran Dearah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor ....];
10. Peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah [RPJM] kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 [Lembaran Derah Kabupaten Luwu Timur Tahun..... Nomor.....].
11. Peraturan Dearah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas pokok Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan kabupaten Luwu Timur dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan program kerja Dinas Perhubungan selama 5[Lima] tahun kedepan. Dengan demikian penyusunan RENSTRA ini menjadi landasan penyusunan semua dokumen operasional perencanaan pembangunan sector Perhubungan di Kabupaten Luwu Timur.

Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 adalah Sebagai Berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan Prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, Sehingga tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan [Stakeholders] tentang rencana pembangunan tiap tahun;
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
5. Memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan kabupaten Luwu Timur dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur periode 2016-2021;

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB 1 Pendahuluan**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/kota,dan dengan RENSTRA PD;

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD;

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi Dokumen;

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran [tugas dan fungsi] Dinas Perhubungan kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RENSTRA Dinas perhubungan kabupaten Luwu Timur periode sebelumnya, mengemukakan capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RENSTRA Dinas Perhubungan kabupaten Luwu Timur Periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui RENSTRA ini.

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur PD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan kabupaten Luwu Timur, struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi;

## 2.2 Sumber Daya PD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dalam menjelaskan Tugas dan Fungsinya;

## 2.3 Kinerja Pelayanan PD

Bagian ini menunjukkan tingkat pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan sasaran atau target RENSTRA periode sebelumnya.

## 2.4 Tantangan & Peluang Pengembangan pelayanan PD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap RENSTRA kementerian perhubungan dan RENSTRA dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, hasil Telaah terhadap RT RW ,dan Hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan dinas Perhubungan kabupaten Luwu Timur pada Lima Tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan layanan yang dibutuhkan.

# **BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada bagian ini di kemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan di Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih bagian ini mengemukakan Telaah terhadap Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaah RENSTRA kementerian Perhubungan dan RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Telaah RENSTRA kementerian perhubungan dan RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi

selatan ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan Sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur terhadap sasaran RENSTRA K/L dan RENSTRA PD provinsi tersebut.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis Telaah rencana tata ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Di bandingkan dengan struktur dan pola ruang system maka PD dapat Mengidentifikasi arah [Geografis] pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD lima tahun mendatang. Di kaitkan dengan indikasi program memanfaatkan ruang jangka menengah dalam RT RW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya dengan sesuai TR RW tersebut. Sedangkan kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya di singkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi besar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana dan/ atau Program.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah Kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi Isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi PD diperoleh baik berasal dari analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi PD di masa lima tahun mendatang.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan kabupaten Luwu Timur beserta indicator kinerjanya.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada Bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan kabupaten Luwu Timur dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif [perumusan rencana program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur.

##### 2.1.1. Tugas dan Fungsi Organisasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

##### a. Tugas

Tugas pokok Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Perhubungan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan.

##### b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

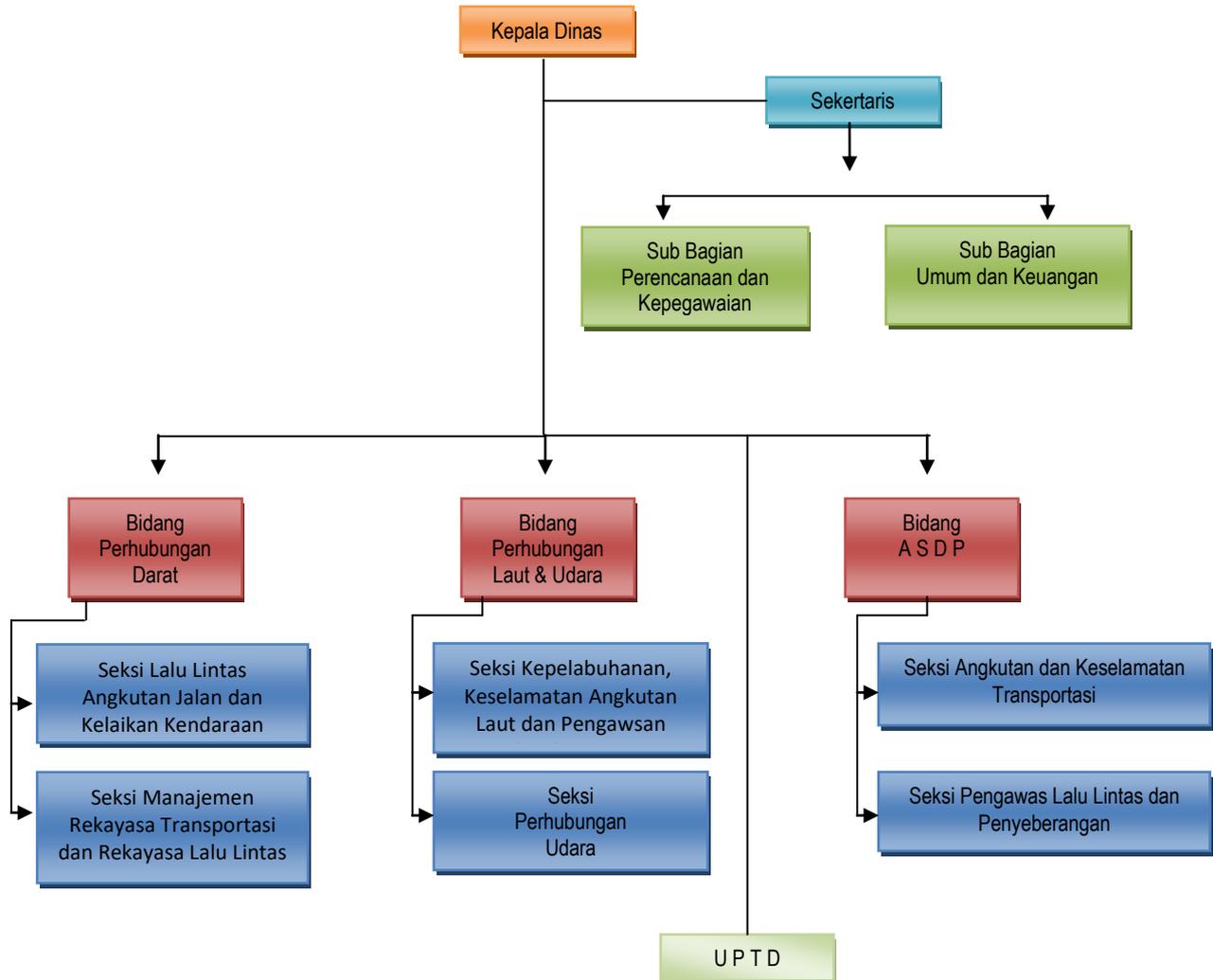
- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.
- 4) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.2. Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur maka susunan organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
3. Bidang Perhubungan Darat terdiri atas :
  - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Kelaikan Kendaraan; dan
  - b. Seksi Manajemen Rekayasa Transportasi dan Rekayasa Lalu Lintas.
4. Bidang Perhubungan Laut dan Udara terdiri atas :
  - a. Seksi Kepelabuhanan, Keselamatan Angkutan Laut dan Pengawasan Wilayah Perairan; dan
  - b. Seksi Perhubungan Udara.
5. Bidang Angkutan, Sungai, Danau dan Perairan terdiri atas :
  - a. Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi; dan
  - b. Seksi Pengawas Lalu Lintas dan Penyeberangan.

**Gambar 1.1**  
**Bagan Struktur Organisasi**  
**Dinas Perhubungan**



## 2.2 Sumber Daya PD

Dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana yang terurai sesuai dengan susunan organisasi diatas, pada Dinas Perhubungan memiliki pegawai sejumlah 33 orang . Jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat, golongan dan jabatan dapat lihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan**

No.	Unit Kerja	Golongan													Jumlah (org)
		IV.c	IV.b	IV.a	III.d	III.c	III.b	III.a	II.d	II.c	II.b	II.a	I.d	I.c	
1.	Kepala Dinas	1													1
2.	Sekretariat		1		1	1	1	2		1	2				9
3.	Bidang Hubdat			1		1	1		1	10					14
4.	Bidang Hublautud				1	1	1		2						5
5.	Bidang ASDP				1	1	1				1				4
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>3</b>				<b>33</b>

**Tabel 2.2**  
**Daftar Pegawai Berdasarkan Eselon**

No.	Unit Kerja	Eselon						Jumlah (org)
		II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V	
1.	Kepala Dinas	1						1
2.	Sekretariat		1		2			3
3.	Bidang Hubdat			1	2			3
4.	Bidang Hublautud			1	2			3
5.	Bidang ASDP			1	2			3
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>			<b>13</b>

**Tabel 2.3**  
**Daftar Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah (org)
		S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	
1.	Kepala Dinas	1						1
2.	Sekretariat		6		3			9
3.	Bidang Hubdat		4	1	8			13
4.	Bidang Hublautud	1		2				3
5.	Bidang ASDP		2		1			3
	<b>Jumlah</b>							<b>33</b>

### 2.3 Kinerja pelayanan PD

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur selama periode tahun 2010 sampai 2015 ditunjukkan pada tabel 2.4 tentang Review Pencapaian Kinerja Pelayanan PD dan Tabel 2.5 tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD

Pada tabel 2.4 dapat dilihat bahwa pada sektor perhubungan terdapat beberapa indikator yang telah mencapai target. Namun terdapat 3 indikator yang realisasinya masih 0% hingga tahun 2015 yaitu tidak terbangunnya bandara dan terminal dan belum beroperasinya pelabuhan laut. Ketiga indikator ini merupakan program kegiatan yang diharapkan dapat memajukan ekonomi dan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu ketiga target tersebut tetap diupayakan akan diwujudkan pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 -2021.

Pada tabel 2.5 ditampilkan pagu anggaran dan realisasinya selama kurun 5 tahun (2010 – 2015). Di sektor belanja secara umum capaian anggaran hampir mencapai 100%, sedangkan di sektor pendapatan terdapat peningkatan drastis pada tahun ke-3 dan ke-4 namun menurun tajam pada tahun ke-5. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi retribusi yaitu Undang – undang 28 tahun 2010 Tentang Pajak dan Retribusi

**Tabel 2.4**  
**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	Target SPM	Target IKK (PP 08 Thn 2008)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
	ASPEK KESEJAHTERAN MASYARAKAT																		
A.	Perhubungan																		
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum				95.000	190.500	200.000	200.515	210.167	199.498	200.543	206.687	214.084	238.390	107.26%	105.27%	103.34%	106.77%	113.43%
2	Rasio ijin trayek				0,0500%	0,051%	0,054%	0,061%	0,06%	0,053%	0,054%	0,063%	0,059%	0,053%	106.00%	105.88%	116.67%	96.72%	88.33%
3	Jumlah uji kir angkutan umum				1.000	1.050	1.200	1.500	2.000	1.065	1.264	852	2.055	2.270	106.50%	120.38%	71.00%	137.00%	113.50%
4	Jumlah pelabuhan laut/udara / terminal bus																		
	a. Pelabuhan laut				0	0	0	0	1	3	3	3	3	3					0,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	Target SPM	Target IKK (PP 08 Thn 2008)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
	b. Dermaga	60%			0	0	2	0	0	7	7	7	7	7			350,00%		
	c. Bandar udara				0	0	0	0	1	1	1	1	1	1					0,00%
	d. Terminal bis	40%			0	0	0	0	1	2	2	2	2	2					0,00%
5	Angkutan darat				800	890	900	950	2000	895	901	931	2679	2451	111.88%	101.24%	103.44%	282.00%	122.55%
6	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	60%			5%	7%	7,5%	9%	10%	7.98%	8.04%	8.49%	23.31%	7.41%	159.60%	114.86%	113.20%	259.00%	74.10%
7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit)				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum																		
	a. Penumpang (Rp)				29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	b. Bus (Rp)				34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	Target SPM	Target IKK (PP 08 Thn 2008)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
	c. Pick Up (Rp)				34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	d. Truck sumbu 2 (Rp)				34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	e. Truck sumbu (Rp)				44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9	Pemasangan Rambu - rambu	60%																	
	a. Marka (meter)				1050	500	500	500	500	0	6875	4036	15000	15030	0,00%	1375,00%	807,20%	3000,00%	3006,00%
	b. Rambu (Batang)				50	50	50	50	50	50	31	120	0	75	100,00%	62,00%	240,00%	0,00%	150,00%
	c. Traffic light (set)				0	0	0	0	0	0	0	0	1	1					
	d. Warning Light (buah)				0	0	0	0	0	4	0	0	5	4					
	e. RPPJ (buah)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	f. Guardrail (meter)				0	0	0	0	0	0	45	0	0	50					
	h. Deliniator (buah)				0	0	0	0	0	0	0	132	0	0					
	g. Road stud (paku jalan) (buah)				0	0	0	0	0	0	0	478	400	0					

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	Target SPM	Target IKK (PP 08 Thn 2008)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
16	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan				100%	100%	100%	100%	100%	193.83 %	193.08 %	188.22 %	65.61%	77.30%	193.83%	193.08%	188.22%	65.61%	77.30%
17	Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum									332.662	350.170	368.600	436.580	471.694					
18	Jumlah orang melalui dermaga / bandara / terminal pertahun									288.758	303.955	319.953	332.526	375.455					
19	Jumlah barang melalui dermaga / bandara / terminal pertahun									146.127	153.817	161.913	222.496	233.304					

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011 1	2012 2	2013 3	2014 4	2015 5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
<b>PAD</b>	<b>254.642.500</b>	<b>279.000.000</b>	<b>744.195.000</b>	<b>758.827.775</b>	<b>1.056.545.454</b>	<b>263.796.900</b>	<b>710.455.437</b>	<b>759.412.500</b>	<b>859.980.872</b>	<b>339.077.454</b>	<b>103,60</b>	<b>254,64</b>	<b>102,04</b>	<b>113,33</b>	<b>32,09</b>	<b>160.380.590,80</b>	<b>15.056.111</b>
Pendapatan Asli Daerah	254.642.500	279.000.000	744.195.000	758.827.775	1.056.545.454	263.796.900	710.455.437	759.412.500	859.980.872	339.077.454	103,60	254,64	102,04	113,33	32,09	160.380.590,80	15.056.111
<b>Belanja</b>	<b>5.074.371.078</b>	<b>4.447.812.044</b>	<b>6.788.637.114</b>	<b>7.194.424.738</b>	<b>7.109.022.554</b>	<b>3.749.028.038</b>	<b>4.083.515.017</b>	<b>6.554.712.429</b>	<b>6.981.194.635</b>	<b>6.872.455.669</b>	<b>73,88</b>	<b>91,81</b>	<b>96,55</b>	<b>97,04</b>	<b>96,67</b>	<b>406.930.295,20</b>	<b>624.685.526</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.496.064.578</b>	<b>1.571.235.044</b>	<b>1.777.073.614</b>	<b>1.916.348.088</b>	<b>2.097.459.054</b>	<b>1.421.208.026</b>	<b>1.517.588.043</b>	<b>1.734.999.569</b>	<b>1.877.310.643</b>	<b>2.052.742.809</b>	<b>95,00</b>	<b>96,59</b>	<b>97,63</b>	<b>97,96</b>	<b>97,87</b>	<b>120.278.895,20</b>	<b>126.306.957</b>
Gaji dan Tunjangan	987.284.578	1.159.035.044	1.276.073.614	1.420.148.088	1.579.059.054	1.008.094.026	1.124.500.497	1.266.876.050	1.405.299.946	1.561.409.173	102,11	97,02	99,28	98,95	98,88	118.354.895,20	110.663.029
Tambahan Penghasilan PNS	508.780.000	412.200.000	501.000.000	496.200.000	518.400.000	413.114.000	393.087.546	468.123.519	472.010.697	491.333.636	81,20	95,36	93,44	95,13	94,78	1.924.000,00	15.643.927
<b>Belanja Langsung</b>	<b>3.578.306.500</b>	<b>2.876.577.000</b>	<b>5.011.563.500</b>	<b>5.278.076.650</b>	<b>5.011.563.500</b>	<b>2.327.820.012</b>	<b>2.565.926.974</b>	<b>4.819.712.860</b>	<b>5.103.883.992</b>	<b>4.819.712.860</b>	<b>65,05</b>	<b>89,20</b>	<b>96,17</b>	<b>96,70</b>	<b>96,17</b>	<b>286.651.400,00</b>	<b>498.378.570</b>
Belanja Pegawai	341.000.000	415.680.000	28.000.000	900.000	28.000.000	341.000.000	386.848.462	28.000.000	900.000	28.000.000	100,00	93,06	100,00	100,00	100,00	(62.600.000,00)	(62.600.000)

Belanja Barang dan Jasa	2.542.193. 250	1.450.632. 000	2.256.352. 500	3.613.463. 500	2.256.352. 500	1.294.300. 512	1.240.870. 297	2.126.761 .460	3.514.352 .342	2.126.761 .460	50,9 1	85, 54	94, 26	97, 26	94, 26	(57.168.15 0,00)	166.492.1 90
Belanja Modal	695.113.2 50	1.010.265. 000	2.727.211. 000	1.663.713. 150	2.727.211. 000	692.519.5 00	938.208.2 15	2.664.951 .400	1.588.631 .650	2.664.951 .400	99,6 3	92, 87	97, 72	95, 49	97, 72	406.419.55 0,00	394.486.3 80
<b>Jumlah</b>	<b>(4.819.72 8.578)</b>	<b>(4.168.81 2.044)</b>	<b>(6.044.44 2.114)</b>	<b>(6.435.59 6.963)</b>	<b>(6.052.47 7.100)</b>	<b>(3.485.23 1.138)</b>	<b>(3.373.05 9.580)</b>	<b>(5.795.29 9.929)</b>	<b>(6.121.21 3.763)</b>	<b>(6.533.37 8.215)</b>							

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

### 2.4.1. Analisis RENSTRA Kementerian Perhubungan dan RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan dilakukan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan regional yang bersumber dari Kementerian terkait yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian PD Pemerintah Provinsi yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan kegiatannya senantiasa mengacu kepada kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka mensinergikan program / kegiatan yang akan dilaksanakan maka dilakukan koordinasi – koordinasi seperti Musrembang atau mengikuti rapat teknis yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Adapun arah kebijakan pembangunan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

a. Kebijakan Kementerian Perhubungan (*sumber RENSTRA Kementerian Perhubungan 2015 – 2019*)

1. Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan transportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi

2. Pelayanan Transportasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, (2) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan, (3) Meningkatnya

kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, (4) Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*, (5) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, (6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi, dan (7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan *clean governance*

### 3. Kapasitas Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya kapasitas sarana sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda (2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang, (3) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia, (4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dan (5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

#### b. Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan (*Sumber RENSTRA 2013-2018*)

1. Pembangunan angkutan massal berbasis rel dan berbasis jalan.
2. Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan fasilitas Keselamatan Perhubungan Darat.
3. Peningkatan Kapasitas Perhubungan Udara.
4. Peningkatan Kapasitas Perhubungan Laut.
5. Pengembangan Pendidikan Unggulan Transportasi.
6. Pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan perlu ditunjang dengan manajemen administrasi perkantoran yang efektif dan efisien;
7. Perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan, kinerja dan perilaku Sumber Daya Manusia ( SDM ) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan.

8. Peningkatan kondisi prasarana jalan merupakan upaya mempertahankan tingkat pelayanan (*level of service*), kenyamanan dan keamanan pemakai jalan;
  9. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi fasilitas penunjang prasarana lalu lintas;
  10. Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang, maka perlu di bangun sarana dan prasarana terminal yang representatif;
  11. Guna mendukung kelancaran dan ketetapan pelayanan angkutan, perlu didukung dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan angkutan;
- 2.4.1. Meningkatkan dan mengembangkan keterpaduan pada rencana tata ruang dan dinamika perkembangan masyarakat;
  - 2.4.2. Meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan;

Adapun Telaah yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perlunya dilakukan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
- b. Perlunya dilakukan restrukturisasi sarana dan prasarana bidang perhubungan;
- c. Perlunya dilakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) agar mampu melaksanakan tugas dengan akuntabel dan reponsif serta melaksanakan pemerintahan yang baik untuk memicu pertumbuhan ekonomi wilayah;

Dengan demikian Kebijakan Nasional Kementerian Perhubungan, serta Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan sangat mendukung dan sejalan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur

#### 2.4.2. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanannya dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW Kabupaten Luwu Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut

**Tabel 2.6**  
**Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah**  
**Kabupaten Luwu Timur**

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terminal Tipe C	Terminal Non Tipe Malili, Tomoni, Wondula dan Sorowako	Pembangunan Terminal Tipe C	Terminal tipe C di titik simpul transportasi dalam kabupaten	Tarengge (Wotu), Puncak Indah (Malili)
2	Bandara udara	Bandara Udara Khusus Sorowako	Pembangunan bandara udara kabupaten sembari dilakukan optimalisasi bandara khusus sorowako	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kajian administrasi dan teknis bandara kabupaten</li> <li>- Bandar udara kabupaten</li> <li>- Penggunaan sementara bandara khusus Sorowako untuk komersil</li> </ul>	Malili
3	Kereta Api		Penyusunan dokumen perencanaan	- Kajian administrasi dan teknis rencana jaringan kereta api	Pare – Pare – Tarengge, Poso – Tarengge, Kolaka - Tarengge

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Fasilitas keselamatan jalan	Rambu – rambu lalu lintas	Peningkatan fasilitas keselamatan jalan	Perlengkapan keselamatan lalu lintas jalan	Jalan kabupaten

**Tabel 2.7**  
**Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur**

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)	Kawasan pemerintahan dan kawasan perdagangan	Pembangunan Terminal Tipe C	Terminal tipe C di titik simpul transportasi dalam kabupaten	Tarengge (Wotu), Puncak Indah (Malili)
2	Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)	Kawasan Tambang dan Kawasan pemerintahan	Pembangunan bandara udara kabupaten sembari dilakukan optimalisasi bandara khusus sorowako	- Kajian administrasi dan teknis bandara kabupaten - Bandara udara kabupaten - Penggunaan sementara bandara khusus sorowako untuk komersil	Malili
3	Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)	Hutan Lindung, sempadan sungai dan pantai, kawasan pertanian dan perikanan	Penyusunan dokumen perencanaan	- Kajian administrasi dan teknis rencana jaringan kereta api	Pare – pare – tarengge, Poso – tarengge, Kolaka - Tarengge
4	Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)	Kawasan pemerintahan dan kawasan pemukiman	Peningkatan fasilitas keselamatan jalan	Perlengkapan keselamatan lalu lintas jalan	Jalan kabupaten

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Selama periode pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur tahun 2010 sampai 2015 terdapat beberapa permasalahan yang belum dapat diatasi. Jika mengacu ke tabel 2.4 tentang Review Pencapaian Kinerja Pelayanan PD, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak tercapainya beberapa target karena pengembangan infrastruktur perhubungan dan layanan telekomunikasi yang masih belum maksimal, meskipun terdapat beberapa target yang dapat dicapai dengan baik. Berikut permasalahan pelayanan di bidang perhubungan yang dicatat selama periode 2010 – 2015 :

1. Prasarana perhubungan untuk mendukung terwujudnya sistem transportasi kota yang sesuai hirarki tata ruang (RTRW) belum berjalan optimal, antara lain belum terwujudnya pembangunan Terminal Tarengge dan Terminal Malili. Belum terlaksananya pembangunan Terminal Tarengge karena masih terkendala karena lahan tempat rencana pembangunan terminal masih menjadi milik PTPN XVI sampai saat ini. Keberadaan terminal ini sangat penting karena berada pada lokasi yang sangat strategis di Pertigaan Tarengge, Kecamatan Wotu, sebagai titik pertemuan / perlintasan kendaraan yang menuju Palopo, Kolaka dan Poso. Kondisi akhir upaya pembebasan lahan ini telah tercapai kesepakatan antara pemerintah daerah dengan PTPN XVI untuk membeli lahan tersebut dan ditargetkan selesai pada bulan oktober 2016. Pelayanan terminal dan halte di ibukota kabuapten yang belum optimal, sehingga perlu optimalisasi pelayanan terminal utamanya Terminal Malili. Kondisi lahan terminal yang ada saat ini kurang sesuai dengan tata ruang yang diatur dalam RTRW, sehingga harus segera dibuat terminal angkutan darat tipe C di belakang SPBU Malili. Lahan terminal yang telah disiapkan belum dapat dibangun karena masih berupa rawa – rawa sehingga masih membutuhkan pematangan lahan (penimbunan dan pemadatan). Pada akhir tahun 2016 ini telah dilakukan penimbunan tahap 1 dan tahap selanjutnya pada tahun 2017;

2. Pelabuhan Waru – Waru di Lampia belum dapat dioperasikan karena belum tersedianya akses jalan masuk ke pelabuhan. Kondisi jalan saat ini baru tahap pembetonan sepanjang 3 Km dengan lebar 5 meter, dengan sisa jalan yang belum dibeton sepanjang 500 meter. Pengoperasian pelabuhan ini diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi baru di Kabupaten Luwu Timur;
3. Kebutuhan akan sarana transportasi udara menjadi sangat penting di Luwu Timur karena rentang jarak yang jauh sekitar 12 jam perjalanan darat dari ibu kota provinsi Sulawesi Selatan (Makassar). Pemerintah daerah telah berupaya menggunakan Bandara Khusus Sorowako dapat melayani penerbangan umum / komersial belum dapat terwujud di tahun 2015, dikarenakan panjang landasan (*runway*) yang ada saat ini belum cukup untuk dapat didarati pesawat kapasitas 70 penumpang milik PT. Lion Air atau PT. Garuda Indonesia. Kedua perusahaan ini menjadi target pemerintah daerah agar dapat melayani penerbangan umum di Kabupaten Luwu Timur;
4. Masih tingginya pelanggaran lalu lintas utamanya angkutan umum khususnya dalam hal pengurusan ijin dan buku keur, sehingga perlu peningkatan operasi penertiban lalu lintas dan angkutan;
5. Tingginya angka kecelakaan karena sarana fasilitas keselamatan jalan berupa rambu – rambu dan marka harus masih kurang sehingga harus dilakukan penambahan;
6. Jumlah kendaraan bus sekolah yang ada saat ini dirasakan masih kurang memenuhi kebutuhan dasar bus sekolah untuk mengangkut siswa sekolah yang rumahnya jauh dari sekolahnya. Oleh karena itu harus segera dilakukan penambahan unit baik dibiayai oleh APBD maupun bantuan dari Kementerian Perhubungan;
7. Saat ini kualitas SDM pelaku transportasi masih rendah dan kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan perkembangan teknologi transportasi. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan pengembangan dan peningkatan SDM transportasi.

**Tabel 3.1****Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Prasarana perhubungan untuk mendukung terwujudnya sistem transportasi kota yang sesuai hirarki tata ruang (RTRW) belum berjalan optimal	belum terlaksananya pembangunan Terminal Tarengge dan Terminal Malili	karena masih terkendala karena lahan tempat rencana pembangunan terminal masih menjadi milik PTPN XVI sampai saat ini
2	Pelabuhan Waru – Waru di Lampia belum dapat dioperasikan	Pelabuhan Waru – Waru di Lampia belum dapat dioperasikan	karena belum tersedianya akses jalan masuk ke pelabuhan
3	Kebutuhan akan sarana transportasi udara menjadi sangat penting di Luwu Timur karena rentang jarak yang jauh sekitar 12 jam perjalanan darat dari ibu kota provinsi sulawesi selatan (Makassar)	Pemerintah daerah telah berupaya menggunakan Bandara Khusus Sorowako dapat melayani penerbangan umum / komersil belum dapat terwujud di tahun 2015)	dikarenakan panjang landasan ( <i>runway</i> ) yang ada saat ini belum cukup untuk dapat didarati pesawat kapasitas 70 penumpang milik PT. Lion Air atau PT. Garuda Indonesia. Kedua perusahaan ini menjadi target pemerintah daerah agar dapat melayani penerbangan umum di Kabupaten Luwu Timur
4	tingginya pelanggaran lalu lintas	Khususnya angkutan umum yang masih lalai dalam hal pengurusan ijin dan buku keur	Kelalaian dari pemilik kendaraan layak uji dan masih kurangnya operasi penertiban lalu lintas dan angkutan

5	Tingginya angka kecelakaan	Kurangnya fasilitas keselamatan jalan	Kurangnya kesadaran dari pengemudi dan belum optimalnya fasilitas keselamatan jalan berupa rambu-rambu dan marka jalan
6	Siswa siswi sekolah belum seluruhnya merasakan layanan antar jemput bus sekolah	Jumlah kendaraan bus sekolah yang ada saat ini masih kurang	Semakin bertambahnya jumlah siswa siswi sekolah
7	Kualitas SDM pelaku transportasi masih rendah	kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan perkembangan teknologi transportasi	Masih Kurangnya pengembangan dan peningkatan SDM transportasi

### 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur terpilih yaitu **Bpk. H. Ir. Muh. Thoriq Husler dan Bpk H. Irwan Basri Syam, ST** periode 2016 -2021 adalah “Luwu Timur Terkemuka 2021”. Visi ini bermakna bahwa pada tahun 2021 Luwu Timur merupakan daerah terkemuka dibanding kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Aspek-aspek yang menjadi penanda dari Luwu Timur yang terkemuka tersebut adalah daerah dan masyarakat Luwu Timur yang maju, sejahtera dan mandiri. Dalam khazanah bahasa daerah, kondisi tergambar dalam frasa “*Wanua Mappatuo Naewa i Alena*”. Artinya, “negeri menghidupi rakyat dan mengukuhkan dirinya”. Maju, sejahtera dan mandiri ini tercapai melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis pada sumberdaya yang dimiliki daerah ini. Dengan demikian, dalam rumusan pernyataan visi ini terkandung tiga pokok visi yakni maju, sejahtera dan mandiri. Artinya, Luwu Timur pada tahun 2021 akan terkemuka dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan dalam hal kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian.

Pernyataan visi ini ditindaklanjuti dengan 8 misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai nilai budaya.
2. Mendorong peningkatan investasi daerah.
3. Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi.
5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah.
6. Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama.
8. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah.

Jika menilik misi Bupati dan Wakil Bupati dan penjelasan pada 118 program prioritasnya, maka pelayanan Dinas Perhubungan memiliki keterkaitan pada 1 misi yaitu :

#### **Misi 5 :**

#### **“Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah”**

Misi ini mencakup upaya meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan, meningkatkan kapasitas perhubungan udara, darat, laut dan danau, mengembangkan perumahan dan permukiman, meningkatkan kapasitas infrastruktur sumberdaya air dan irigasi, memenuhi infrastruktur dasar masyarakat pesisir, dan meningkatkan kapasitas penanganan bencana.

Dalam rangka mewujudkan program – program yang terdapat dalam Visi dan Misi maka Dinas Perhubungan selaku penanggung jawab fungsi pemerintahan bidang perhubungan menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk

mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi PD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan PD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi: LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Misi 5 : Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah</b>			
	a. Optimalisasi bandara sorowako menjadi bandara domestic	- Bandara khusus sorowako milik PT. Vale Indonesia Tbk belum dapat dimanfaatkan untuk melayani penerbangan umum / komersil	- telah diupayakan mencari maskapai yang memiliki pesawat yang dapat mendarat di bandara sorowako kondisi saat ini (tipe ATR 42) yaitu expres air dan susi air, namun belum bersedia dengan alasan rute sorowako - makassar saja kurang ekonomis, sehingga	- izin penggunaan bandara khusus sorowako dapat melayani penerbangan umum telah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan melalui SK Menhub Nomor : KP 1204 Tahun 2013 dan Sertifikat bandara udara Nomor 042/SBU-DBU/I/2014

Visi: LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			meminta pemda untuk mencari rute tambahan ke daerah lain. ada maskapai yang bersedia melayani yaitu IAT tapi tetapi cost yang harus ditanggung oleh penumpang cukup mahal sekitar Rp1.5juta, tentunya ini cukup memberatkan masyarakat sehingga kemungkinan pengguna pesawat udara menjadi sedikit / terbatas	
			- Spesifikasi teknis bandara (panjang runway 1.100mtr - minimal 1.300mtr dan Strength Surface 38.000lbs - min 44.000lbs) belum sesuai dengan jenis pesawat diharapkan dapat mendaratnya	- telah dibuat Mou antara PT. Vale Indonesia Tbk dengan Pemda kab. Luwu Timur Nomor 072/IV/2014/GOV/EXR - 553.2/3/PEM-LT/IV/2014 tentang penggunaan sementara bandar udara khusus sorowako untuk pelayanan penerbangan umum
			- Fasilitas darat bandara untuk pesawat yang direncanakan mendarat belum tersedia yaitu taxiway, apron dan ruang tunggu	- tingginya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi yang cepat sampai tujuan dikarenakan selama ini waktu tempuh perjalanan dari Luwu timur ke ibukota provinsi (makassar) yang lama (sekitar 11jam)
			- biaya penambahan infrastruktur bandara sorowako berupa penambahan runway, apron, taxiway dan ruang tunggu sangat besar. Pihak PT. Vale Indonesia Tbk	- adanya dukungan yang kuat dari pemerintah daerah untuk mendorong terwujudnya penerbangan komersil di kabupaten luwu timur menggunakan bandara sorowako.

Visi: LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			berharap adanya dukungan atau sharing pendanaan dari pemerintah daerah	
	b. pembangunan bandar udara	- belum tersedianya bandara udara umum di Kabupaten Luwu Timur	- belum tersedianya lahan, dokumen administrasi dan teknis pembangunan bandara serta penetapan / persetujuan dari pemerintah pusat	- adanya keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk dapat memwujudkan sarana transportasi udara di kabupaten luwu timur dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ekonomi
			- pembangunan bandara membutuhkan dana yang besar dan waktu yang lama	- adanya kebijakan pemerintah pusat yang akan meningkatkan konektivitas antar daerah dan sharing pembangunan bandara dengan pemerintah daerah
			- belum tersedia SDM pengelola bandara	- pengelolaan bandara di daerah dapat dilakukan oleh UPTD kemenuh atau swasta
	c. pengoperasian pelabuhan waru-warumalili	- pelabuhan waru - warumalili belum dioperasikan	- akses jalan yang representatif belum sampai ke lokasi pelabuhan waru - warumalili	- Pembangunan jalan beton lebar 5 meter sampai ke lokasi pelabuhan waru - warumalili oleh Dinas PU diharapkan dapat rampung tahun ini, dan tahun depan diperlebar menjadi 10 meter
			- pasca tata batas kawasan hutan, kepemilikan lahan belum ada payung hukumnya. Belum jelas lahan yang akan dikelola oleh kementerian perhubungan selaku	- pemerintah daerah telah memiliki marterplan kawasan pelabuhan laut waru - warumalili terkait rencana pengembangan kawasan pelabuhan tersebut

Visi: LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			operator pelabuhan dan pemerintah daerah yang akan mengembangkan kawasan pelabuhan.	
	d. pembangunan terminal tarengge	- pembangunan terminal tarengge belum dapat dilaksanakan	- pembebasan lahan belum selesai dilaksanakan	- kawasan tarengge merupakan kawasan strategis untuk dikembangkan sebagai terminal karena menjadi perlintasan kendaraan umum trayek dalam daerah dalam provinsi dan luar provinsi (palu, manado, kendari)
			- dokumem administrasi dan teknis belum tersedia	- lokasi lahan terminakl seluas 6 Ha milik PT. PN IV telah mendapat persetujuan pelepasan aset dari menteri BMUN
	e. Pengadaan Bus Sekolah 18 Unit	- bus sekolah yang ada belum memadai untuk melayani siswa & siswi sekolah yang ada di 11 kecamatan	- sarana angkutan umum yang layak untuk digunakan siswa & siswi sekolah belum memadai bahkan cenderung kurang. Rata - rata siswa siswi menggunakan kendaraan motor sehingga kurang aman	- program pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan gratis secara menyeluruh

### 3.3. Telaah RENSTRA Kementerian Perhubungan, Kementerian serta Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

#### 3.2.1. Telaah RENSTRA Kementerian Perhubungan 2015 – 2019

Telaah RENSTRA Kementerian Perhubungan 2015 – 2019 untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra PD. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara RENSTRA PD kabupaten dengan Renstra kementerian serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau kementerian dengan kabupaten.

**Tabel 3.2**  
**Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</b>				
<b>Penguatan Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan</b>				
1.	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi <i>backlog</i> maupun <i>bottleneck</i> kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda	- Pelabuhan Waru – Waru di Lampia belum dapat dioperasikan - belum tersedianya bandara udara yang melayani penerbangan umum - sarana pendukung dermaga penyeberangan ASDP masih kurang	- akses jalan masuk ke pelabuhan belum terselesaikan - panjang runway bandara sorowako belum cukup untuk didarati pesawat tipe ATR 72 - belum tersedianya dokumen administrasi dan teknis serta lahan untuk pembangunan bandara - Kondisi infrastruktur ASDP belum optimal karena sarana pendukung dermaga seperti ruang tunggu, WC, kantor dan kios belum tersedia	- telah dilaksanakan pembangunan jalan beton sepanjang 3000 meter, sisa 350 meter yang belum sampai namun akan diselesaikan tahun 2016 ini. - saat ini sedang dilakukan penambahan panjang runway 250mtr sehingga totalnya menjadi 1.350mtr, kemungkinan selesai tahun 2017 - pada anggaran 2017 diupayakan dimasukkan anggaran untuk penyusunan dokumen administrasi dan teknis bandara - dermaga penyeberangan ASDP sebagai sarana

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				transportasi utama dalam penyeberangan di danau matano dan towuti, sehingga perlu segera dilengkapi dengan sarana pendukung
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global			
3.	Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi	Masih tingginya pelanggaran lalu lintas utamanya angkutan umum khususnya dalam hal pengurusan ijin dan buku keur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pemilik kendaraan cenderung malas mengurus ijin dan menguji kendaraannya.</li> <li>- teanga operasional untuk pengawasan dan pengujian sedikit.</li> </ul>	Sering dilakukan sosialisasi di lapangan pada saat kegiatan operasi di jalan
4.	Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) di sektor transportasi			
5.	Tersedianya layanan transportasi di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya	Jumlah kendaraan bus sekolah yang ada saat ini dirasakan masih kurang memenuhi kebutuhan dasar bus sekolah untuk mengangkut siswa sekolah yang rumahnya jauh dari sekolahnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendaraan Angkutan umum dalam kota sangat sedikit yang bisa digunakan siswa untuk ke sekolah.</li> <li>- lokasi sekolah yang masih berada di ibukota kecamatan sehingga siswa yang tinggal jauh dari kecamatan jadi kesulitan akses sekolah</li> <li>- orang tua cenderung memberikan kendaraan bermotor ke anaknya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jumlah siswa sekolah yang sudah diangkut selama ini masih sedikit dibandingkan yang belum diangkut</li> <li>- tingginya kepercayaan siswa untuk menjadikan bus sekolah sebagai sarana angkutan ke sekolah.</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			untuk ke sekolah, padahal ini sangat tidak aman.	
<b>Pembangunan Transportasi Umum Massal Perkotaan</b>				
6.	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	Prasarana perhubungan untuk mendukung terwujudnya sistem transportasi kota yang sesuai hirarki tata ruang (RTRW) belum berjalan optimal, antara lain belum terwujudnya pembangunan Terminal Tarengge dan Terminal Malili	- lahan terminal tarengge belum selesai pengadaannya - lahan terminal malili belum siap dibangun sehingga harus dilakukan pematangan lahan terlebih dahulu	- telah diatur dalam RTRW 2010 – 2030 mengenai rencana pembangunan terminal malii dan tarengge - masuk dalam visi dan misi bupati terpilih
7.	Meningkatkan kinerja lalu lintas jalan Perkotaan	Tingginya angka kecelakaan karena sarana fasilitas keselamatan jalan berupa rambu – rambu dan marka masih kurang	- masih banyak jalan yang belum dipasang rambu – rambu lalu lintas - kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas	- adanya dana DAK bidang keselamatan transportasi darat dari kementerian perhubungan
8.	Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi Perkotaan			

### 3.2.2. Telaah RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

Telaah RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra PD. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara RENSTRA PD kabupaten dengan Renstra PD provinsi serta mencegah

tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau kementerian dengan kabupaten

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra PD**  
**Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan**  
**Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Kabupaten/kota	Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar moda dan antar wilayah serta pengembangan pendidikan unggulan transportasi yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelabuhan Waru – Waru di Lompia belum dapat dioperasikan</li> <li>- belum tersedianya bandara udara yang melayani penerbangan umum</li> <li>- sarana pendukung dermaga penyeberangan ASDP masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- akses jalan masuk ke pelabuhan belum terselesaikan</li> <li>- panjang runway bandara sorowako belum cukup untuk didarati pesawat tipe ATR 72</li> <li>- belum tersedianya dokumen administrasi dan teknis serta lahan untuk pembangunan bandara</li> <li>- Kondisi infrastruktur ASDP belum optimal karena sarana pendukung dermaga seperti ruang tunggu, WC, kantor dan kios belum tersedia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- telah dilaksanakan pembangunan jalan beton sepanjang 3000 meter, sisa 350 meter yang belum sampai namun akan diselesaikan tahun 2016 ini.</li> <li>- saat ini sedang dilakukan penambahan panjang runway 250mtr sehingga totalnya menjadi 1.350mtr, kemungkinan selesai tahun 2017</li> <li>- pada anggaran 2017 diupayakan dimasukkan anggaran untuk penyusunan dokumen administrasi dan teknis bandara</li> <li>- dermaga penyeberangan ASDP sebagai sarana transportasi utama dalam penyeberangan di danau matano dan towuti, sehingga perlu segera dilengkapi dengan sarana pendukung</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Kabupaten/kota	Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi, di Provinsi Sulawesi Selatan;			
3.	Terwujudnya pelayanan bidang transportasi, yang berkualitas di Sulawesi Selatan;			
4.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan transportasi;			

### 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari tiga dimensi utama yaitu daerah pantai, dataran sampai ke daerah yang berbukit. Sebagian besarnya didominasi oleh wilayah pegunungan (459.946,81 ha). Hal ini menggambarkan suatu daerah menyimpan potensi kandungan sumberdaya alam yang melimpah.

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur untuk dijadikan Asset pengembangan dimasa yang akan datang, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2030 secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Potensi ketersediaan lahan masih luas, dimana kepadatan penduduk yang ada masih rendah sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk berbagai pengembangan kegiatan perekonomian.
2. Potensi hutan dan kekayaan hutan yang masih beragam dan cukup tersedia sejalan dengan visi kabupaten. Potensi ini dapat dikembangkan untuk usaha agribisnis dan bisnis kehutanan. dimana kondisi eksisting menunjukan

bahwa kawasan hutan di Kabupaten Luwu Timur mencapai 62,46 % dari total luas Kabupaten Luwu Timur.

3. Tingkat perkembangan antar kecamatan yang cukup merata. Hal ini ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana di tiap kecamatan cukup merata, khususnya sarana pendidikan, Kesehatan, perdagangan dan peribadatan.
4. Potensi sektor pertambangan, di mana sektor ini merupakan sektor yang sangat besar memberikan kontribusi bagi pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur.
5. Kawasan wisata yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Obyek wisata yang ada pun bervariasi jenisnya, yaitu berupa obyek wisata alam, budaya, bahari, dsb. Berikut ini dijelaskan mengenai obyek-obyek wisata yang terdapat di masing-masing kecamatan di Kabupaten Luwu Timur. Lokasi kawasan wisata tersebut masih memerlukan pembenahan dan pengelolaan dengan upaya peningkatan infrastruktur pendukung kawasan wisata, Potensi ekowisata dan wisata bahari.

Potensi prasarana wilayah yang di miliki oleh Kabupaten Luwu Timur yang dapat dijadikan aset untuk pengembangan di masa yang akan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya jaringan jalan regional yang melewati wilayah Kabupaten Luwu Timur (jalan arteri primer) yang menghubungkan Kabupaten Luwu Timur dengan Kota Makassar, Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Morowali) serta Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Tenggara (Kabupaten Kendari).
2. Terdapat Pelabuhan Laut Lampia yang keberadaannya diharapkan dapat membuka keterisolasian daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau oleh transportasi darat.
3. Adanya bandar udara di Sorowako yang dapat menghubungkan wilayah Kabupaten Luwu Timur dengan wilayah lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Potensi pengembangan pelabuhan di Malili untuk memperkuat keterkaitan dengan wilayah eksternal.

Telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

**Tabel 3.5**  
**Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Kawasan Strategis Kabupaten</b>			
1.	kawasan pemerintahan; diarahkan berpusat di ibukota kabupaten pada kecamatan Malili.	Tingginya angka kecelakaan karena sarana fasilitas keselamatan jalan berupa rambu – rambu dan marka masih kurang	- masih banyak jalan yang belum dipasang rambu – rambu lalu lintas - kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas	- adanya dana DAK bidang keselamatan transportasi darat dari kementerian perhubungan
2.	kawasan cepat tumbuh; diarahkan sebagai pusat kegiatan Pemerintahan dan Perekonomian pada masing-masing wilayah kecamatan yang terdiri atas perkotaan tomoni, burau, wonorejo, kalaena, kertoraharjo, solo, wawondula, wsuponda	- Pelabuhan Waru – Waru di Lampia belum dapat dioperasikan - sarana pendukung dermaga penyeberangan ASDP masih kurang	- akses jalan masuk ke pelabuhan belum terselesaikan - belum tersedianya dokumen administrasi dan teknis serta lahan untuk pembangunan bandara - Kondisi infrastruktur	- telah dilaksanakan pembangunan jalan beton sepanjang 3000 meter, sisa 350 meter yang belum sampai namun akan diselesaikan tahun 2016 ini. - pada anggran 2017 diupayakan dimasukkan

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			ASDP belum optimal karena sarana pendukung dermaga seperti ruang tunggu, WC, kantor dan kios belum tersedia	anggaran untuk penyusunan dokumen administrasi dan teknis bandara - dermaga penyeberangan ASDP sebagai sarana transportasi utama dalam penyeberangan di danau matano dan towuti, sehingga perlu segera dilengkapi dengan sarana pendukung
3.	Kawasan Strategis Nasional Sorowako adalah kawasan Strategis yang ditetapkan dalam RTRWN, adalah kegiatan pertambangan dan pengolahan hasil tambang	- belum tersedianya bandara udara yang melayani penerbangan umum	- panjang runway bandara sorowako belum cukup untuk didarati pesawat tipe ATR 72	- saat ini sedang dilakukan penambahan panjang runway 250mtr sehingga totalnya menjadi 1.350mtr, kemungkinan selesai tahun 2017

### 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati serta kesejahteraan masyarakat. Penentuan isu – isu strategis dilakukan dengan mereview kembali faktor – faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD yang ditinjau dari :

- a) Gambaran pelayanan PD
- b) Sasaran jangka menengah pada RENSTRA Kementerian
- c) Sasaran jangka menengah pada RENSTRA PD provinsi
- d) Implikasi RTRW bagi pelayanan PD

Dalam menentukan isu – isu strategis Dinas Perhubungan tahun 2016 – 2021 dilakukan dengan metode pembobotan

**Tabel 3.6**  
**Nilai Skor Kriteria Penentuan Isu – Isu Strategis**

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	<b>Total</b>	<b>100</b>

Berdasarkan hasil review kembali faktor – faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD maka didapatkan 9 isu yang akan dijadikan isu strategis. Oleh karena untuk menguji apakah ke 9 isu tersebut dapat dijadikan isu strategis maka dilakukan pembobotan dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Nilai Skala Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis**

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor	Rata Rata Skor
		1	2	3	4	5	6		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-10	
1	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Luwu Timur melalui pembangunan terminal, dermaga ASDP dan bandara udara serta penyediaan sarana angkutan anak sekolah	20	10	20	10	15	20	95	15,83
2	Tingginya angka kecelakaan karena sarana fasilitas keselamatan yang masih kurang	10	10	20	5	5	5	55	9,17
3	Tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi yang masih rendah	10	10	20	5	5	5	55	9,17
4	Operasional Pelabuhan Laut Waru – Waru	15	5	10	10	10	25	75	12,50
5	Tersedianya bandara udara di kabupaten	15	5	10	10	10	2	75	12,50

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor	Rata Rata Skor
		1	2	3	4	5	6		
	Luwu Timur						5		
8	Penambahan Jumlah personil / tenaga operasional di lapangan	5	10	10	5	5	5	40	15,83
9	Peningkatan SDM melalui diklat	5	10	10	10	5	5	45	9,17

Berdasarkan hasil pembobotan maka isu dengan bobot diatas 50 yang akan dimasukkan sebagai isu strategis. Berdasarkan tabel 3.7 maka isu nomor 1 sampai 7 layak untuk dijadikan isu strategis pada RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021.

**Tabel 3.8**  
**Susunan isu strategis yang akan ditindaklanjuti**

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor
1.	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Luwu Timur melalui pembangunan terminal, dermaga ASDP dan bandara udara serta penyediaan sarana angkutan anak sekolah	95
2.	Operasional Pelabuhan Laut Waru – Waru	75
3.	Tersedianya bandara udara di kabupaten Luwu Timur	75
6.	Tingginya angka kecelakaan karena sarana fasilitas keselamatan yang masih kurang	55
7.	Tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi yang masih rendah	55

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing Misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan Visi.

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur menggambarkan arah strategi dan peluang-peluang yang ingin diciptakan untuk mencapai Visi Misi Tahun 2016-2021 adalah :

“Mewujudkan Kualitas Keselamatan Transportasi”

Sasaran diartikan sebagai hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi-misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk lima tahun kedepan. Berikut disajikan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur periode tahun 2016-2021 :

1. Meningkatnya kualitas Infrastruktur transportasi
2. Meningkatnya kepatuhan dalam berlalu lintas
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah

Secara lebih seksama, keterkaitan antara misi pembangunan jangka menengah Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur periode tahun 2016-2021 dengan tujuan, sasaran dan indikator-indikator pembangunan yang digunakan dapat dilihat pada tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	TARGET				
					2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mewujudkan kualitas keselamatan transportasi		Angka Kecelakaan Angkutan	%	1,69	2,27	2,04	1,67	1,38
		Meningkatnya kualitas Infrastruktur transportasi	Indeks kualitas infrastruktur transportasi	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kepatuhan dalam berlalu lintas	Indeks kepatuhan berlalu lintas	%	79,56	92,94	94,68	95,51	97,03
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	30,32	50,45	60,57	70,81	80,69

## BAB V

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam RENSTRA diperlukan strategi. **Strategi** adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur akan ditempuh dengan menetapkan kebijakan.

**Kebijakan** merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang di tetapkan oleh pihak yang berwenang untuk di jadikan pedoman bagi setiap organisasi, agar adanya keterpaduan dan upaya untuk mencapai Visi dan Misi.

Adapun Strategi dan Kebijakan yang di tetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur adalah :

Visi : Luwu Timur Terkemuka 2021			
Misi : Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan kualitas keselamatan transportasi	Meningkatnya kualitas Infrastruktur transportasi	Mengoptimalkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, udara udara, dan ASDP	a) Menciptakan pusat simpul transportasi yang teratur melalui pembangunan terminal angkutan, halte dan manajemen transportasi; b) Meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi waktu tempuh / perjalanan masyarakat dari dan menuju Kabupaten Luwu Timur melalui pembangunan bandara udara dan atau optimalisasi bandara udara khusus Sorowako; c) Mendukung peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah melalui operasioalisasi Pelabuhan Laut Waru – Waru; d) Meningkatkan kualitas pelayanan di dermaga penyeberangan melalui pembangunan sarana pendukung dermaga;

	Meningkatnya kepatuhan dalam berlalu lintas	Menciptakan sistem transportasi yang mengedepankan keselamatan dan kelancaran lalu lintas serta ramah lingkungan melalui penanganan yang terpadu (pencegahan, pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, manajemen rekayasa lalu lintas dan penyiapan fasilitas keselamatan jalan)	<p>a)Menyelenggarakan manajemen rekayasa lalu lintas di titik rawan kecelakaan dan kemacetan</p> <p>b)Menyiapkan payung hukum pelaksanaan dan penanganan transportasi Kabupaten Luwu Timur;</p> <p>c) Meningkatkan fasilitas keselamatan jalan;</p> <p>d) Melaksanakan pengawasan dan pengaturan lalu lintas;</p> <p>e) Melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap kondisi angkutan yang laik dan ramah lingkungan;</p> <p>f) Melaksanakan penegakan hukum bagi pelanggar aturan tentang perizinan;</p>
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan guna tercapainya target kinerja dan keuangan serta melaporkannya dengan tertib	<p>a) Merencanakan dan melaksanakan program / kegiatan secara konsisten mengacu kepada dokumen perencanaan jangka menengah dinas (RENSTRA), dengan harapan seluruh target Bupati – Wakil Bupati yang dibebankan kepada Dinas Perhubungan dapat dicapai dalam kurun 5 tahun;</p> <p>b) Mendorong pegawai yang diberi tanggungjawab kegiatan agar melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan petunjuk dan membuat laporan pertanggungjawaban secara benar dan tepat waktu;</p> <p>c) Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan program / kegiatan. Jika terdapat permasalahan, hal – hal yang menyimpang, deviasi capaian target, agar segera dilakukan perbaikan dan revisi target.</p>

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program PD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per PD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan PD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah PD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

**Tabel 6.1**  
**Kebijakan dan Program**

No.	Strategi	Kebijakan	Program
1.	Mengoptimalkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, udara udara, ASDP	Menciptakan pusat simpul transportasi yang teratur melalui pembangunan terminal angkutan, halte dan manajemen transportasi;	- Program peningkatan sarana dan prasarana LLAJ - Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
		Meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi waktu tempuh / perjalanan masyarakat dari dan menuju Kabupaten Luwu Timur melalui pembangunan bandara udara dan atau optimalisasi bandara udara khusus Sorowako;	- Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara - Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Laut dan Udara
		Mendukung peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah melalui operasioalisasi Pelabuhan Laut Waru – Waru;	- Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Laut dan Udara
		Meningkatkan kualitas pelayanan di	Program Peningkatan

No.	Strategi	Kebijakan	Program
		dermaga penyeberangan melalui pembangunan sarana pendukung dermaga;	Sarana dan Prasarana ASDP
2.	Menciptakan sistem transportasi yang mengedepankan keselamatan dan kelancaran lalu lintas serta ramah lingkungan melalui penanganan yang terpadu (pencegahan, pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, manajemen rekayasa lalu lintas dan penyiapan fasilitas keselamatan jalan)	Menyelenggarakan manajemen rekayasa lalu lintas di titik rawan kecelakaan dan kemacetan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan Lalu Lintas</li> <li>- Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</li> </ul>
		Menyiapkan payung hukum pelaksanaan dan penanganan transportasi Kabupaten Luwu Timur;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan Lalu Lintas</li> <li>- Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Penyeberangan</li> </ul>
		Meningkatkan fasilitas keselamatan jalan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan Lalu Lintas</li> <li>- Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</li> <li>- Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Penyeberangan</li> <li>- Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Laut dan Udara</li> <li>- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</li> <li>- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sekolah</li> </ul>
		Melaksanakan pengawasan dan pengaturan lalu lintas;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan Lalu Lintas</li> <li>- Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</li> <li>- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</li> </ul>
		Melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap kondisi angkutan yang laik dan ramah lingkungan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan Lalu Lintas</li> <li>- Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</li> <li>- Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Laut dan Udara</li> <li>- Program Peningkatan</li> </ul>

No.	Strategi	Kebijakan	Program
			Keselamatan Angkutan Penyeberangan
		Melaksanakan penegakan hukum bagi pelanggar aturan tentang perizinan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan Lalu Lintas</li> <li>- Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</li> </ul>
		Melaksanakan peningkatan kualitas SDM perhubungan sehingga mampu menangani persoalan – persoalan di bidang perhubungan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</li> <li>- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> <li>- Program Peningkatan Disiplin Aparatur</li> <li>- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>- Program Perencanaan dan Penganggaran PD</li> </ul>
3.	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan guna tercapainya target kinerja dan keuangan serta melaporkannya dengan tertib	Merencanakan dan melaksanakan program / kegiatan secara konsisten mengacu kepada dokumen perencanaan jangka menengah dinas (RENSTRA), dengan harapan seluruh target Bupati – Wakil Bupati yang dibebankan kepada Dinas Perhubungan dapat dicapai dalam kurun 5 tahun	- Program Perencanaan dan Penganggaran PD
		Mendorong pegawai yang diberi tanggungjawab kegiatan agar melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan petunjuk dan membuat laporan pertanggungjawaban secara benar dan tepat waktu	- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
		Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan program / kegiatan. Jika terdapat permasalahan, hal – hal yang menyimpang, deviasi capaian target, agar segera dilakukan perbaikan dan revisi target	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</li> <li>- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> <li>- Program Peningkatan Disiplin Aparatur</li> <li>- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> </ul>

## 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas Dinas Perhubungan adalah :

**Tabel 6.2**  
**Program dan Kegiatan**

No.	Program	Indikator Program	Kegiatan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
			b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
			c. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
			d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			f. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
			g. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran
			h. Penyediaan Penunjang Operasional Kesekretariatan PD
			i. Kunjungan kerja dalam daerah
			j. Monitoring dan Evaluasi
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
			b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
			c. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
			e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dan hari-hari tertentu	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
			b. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
			c. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

No.	Program	Indikator Program	Kegiatan
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian dan keuangan yang tersusun tepat waktu	a. Penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
			b. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
6.	Program Perencanaan dan Penganggaran PD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran PD
7.	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Persentase fasilitas perhubungan yang berfungsi dengan baik	a. Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Terminal
			b. Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte dan Trotoar
			c. Pemeliharaan rutin / berkala fasilitas keselamatan jalan
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana LLAJ	Persentase fasilitas LLAJ yang terbangun	a. Pembangunan Terminal (KP1)
			b. Pembangunan Halte bus (KP2)
9.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sekolah	Jumlah siswa sekolah yang terangkut pertahunnya	a. Pengadaan bus sekolah (KP1)
10.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Angkutan Yang Layak Jalan	a. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
11.	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang terpelihara	a. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor (KP2)
12.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ASDP	Persentase peningkatan sarana dan prasarana bidang ASDP	a. Peningkatan fasilitas terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP)
			b. Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Terminal ASDP
13.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan angkutan yang aman dan nyaman (laik jalan)	a. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
			b. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor (KP2)
14.	Program Peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan Lalu Lintas	Persentase angkutan yang layak	a. Sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan
		Persentase angka kecelakaan kendaraan wajib uji	b. Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan
			a. Marka (meter)
			b. Rambu (Batang)
			c. Traffic light (set)
			d. Warning Light (buah)
			e. RPPJ (buah)
			f. Guardrail (meter)
			h. Deliniator (buah)
			i. Zoss (titik)
			c. Pengawasan Pengendalian Angkutan
			d. Penyusunan regulasi di bidang

No.	Program	Indikator Program	Kegiatan
			perhubungan darat
15.	Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Penyeberangan	Persentase angka kecelakaan kapal	a. Sosialisasi tentang keselamatan angkutan penyeberangan
			b. Pengendalian disiplin masyarakat menggunakan angkutan ASDP(KP2)
16.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara	Persentase dokumen persyaratan pembangunan bandara	a. Pembangunan Bandara (KP1)
17.	Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Laut dan Udara	Persentase angka kecelakaan kapal	a. Sosialisasi tentang keselamatan pelayaran
			b. Pengawasan Angkutan Laut
			c. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan (KP1)

## 6.2 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan PD

**Tabel 6.3**  
**Kelompok Sasaran Per Kegiatan**

No.	Program	Kegiatan	Kelompok Sasaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	ASN Dinas Perhubungan
		b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	ASN Dinas Perhubungan
		c. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	ASN Dinas Perhubungan
		d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ASN Dinas Perhubungan
		e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ASN Dinas Perhubungan
		f. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	ASN Dinas Perhubungan
		g. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	ASN Dinas Perhubungan
		h. Penyediaan Penunjang Operasional Kesekretariatan PD	ASN Dinas Perhubungan
		i. Kunjungan kerja dalam daerah	ASN Dinas Perhubungan

No.	Program	Kegiatan	Kelompok Sasaran
		j. Monitoring dan Evaluasi	ASN Dinas Perhubungan
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	ASN Dinas Perhubungan
		b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	ASN Dinas Perhubungan
		c. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ASN Dinas Perhubungan
		d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	ASN Dinas Perhubungan
		e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	ASN Dinas Perhubungan
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	ASN Dinas Perhubungan
		b. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	ASN Dinas Perhubungan
		c. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	ASN Dinas Perhubungan
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	ASN Dinas Perhubungan
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	a. Penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	ASN Dinas Perhubungan
		b. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	ASN Dinas Perhubungan
6.	Program Perencanaan dan Penganggaran PD	a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran PD	ASN Dinas Perhubungan
7.	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	a. Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Terminal	Masyarakat pengguna terminal
		b. Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte dan Trotoar	Masyarakat pengguna halte dan trotoar
		c. Pemeliharaan rutin / berkala fasilitas keselamatan jalan	Masyarakat pengguna fasilitas keselamatan jalan
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana LLAJ	a. Pembangunan Terminal (KP1)	Masyarakat pengguna terminal
		b. Pembangunan Halte bus (KP2)	Masyarakat pengguna halte bus
9.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sekolah	a. Pengadaan bus sekolah (KP1)	Siswa dan siswi SMP & SMA Kab. Luwu Timur
10.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	a. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Masyarakat pengguna angkutan
11.	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	a. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor (KP2)	Masyarakat pemilik kendaraan wajib uji
12.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ASDP	a. Peningkatan fasilitas terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP)	Masyarakat pengguna angkutan sungai, danau dan penyeberangan

No.	Program	Kegiatan	Kelompok Sasaran
		b. Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Terminal ASDP	Masyarakat pengguna dermaga penyeberangan
13.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	a. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Masyarakat pemilik kendaraan wajib uji
		b. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor (KP2)	Masyarakat pemilik kendaraan wajib uji
14.	Program Peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan Lalu Lintas	a. Sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan	Masyarakat pengguna transportasi darat
		b. Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Masyarakat pengguna transportasi darat
		a. Marka (meter)	
		b. Rambu (Batang)	
		c. Traffic light (set)	
		d. Warning Light (buah)	
		e. RPPJ (buah)	
		f. Guardrail (meter)	
		h. Deliniator (buah)	
		i. Zoss (titik)	
		c. Pengawasan Pengendalian Angkutan	Masyarakat pengguna transportasi darat
		d. Penyusunan regulasi di bidang perhubungan darat	Masyarakat pengguna transportasi darat
15.	Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Penyeberangan	a. Sosialisasi tentang keselamatan angkutan penyeberangan	Pemilik kapal yang beroperasi di Danau Matano dan Danau Towuti
		b. Pengendalian disiplin masyarakat menggunakan angkutan ASDP(KP2)	Masyarakat pengguna transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan
16.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara	a. Pembangunan Bandara (KP1)	Masyarakat pengguna transportasi udara
17.	Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Laut dan Udara	a. Sosialisasi tentang keselamatan pelayaran	Masyarakat pemilik kapal < GT 7
		b. Pengawasan Angkutan Laut	Masyarakat pemilik kapal < GT 7
		c. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan (KP1)	Masyarakat pengguna transportasi udara dan transportasi Laut

### 6.3 Pagu Indikatif

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada Tabel 6.3 berikut ini

**Tabel 6.3**  
**Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif 2016 – 2020**

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Mewujudkan kualitas keselamatan transportasi	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi	Indeks kualitas infrastruktur transportasi				100%	2,373,240,000	100%	3,429,162,000	100%	11,285,275,720	100%	11,381,861,040	100%	11,884,390,338	100%	40,353,929,098		
				Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase angkutan yang layak jalan ()	75	65	522,930,000	80	2,197,000,000	0	-	0	-	0	-	0	2,719,930,000		
				Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan yang diadakan (unit)		1	522,930,000	6	2,197,000,000	0	-	0	-	0	-	7	2,719,930,000		

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi dengan baik ()	75	80	139,000,000	100	242,700,000	100	163,600,000	100	121,300,000	100	200,000,000	100	866,600,000		
				Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal	Jumlah terminal yang dipelihara (unit)		8	45,000,000	9	70,500,000	3	20,500,000	3	28,000,000	3	40,000,000	3	204,000,000		
				Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte dan Trotoar	jumlah halte yang dipelihara (unit)		0	-	0	-	0	-	0	-	24	30,000,000	24	30,000,000		
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Fasilitas Keselamatan Jalan	Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang dipelihara (buah)		22	94,000,000	22	172,200,000	55	143,100,000	55	93,300,000	55	130,000,000	55	632,600,000		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana LLAJ	Persentase fasilitas LLAJ yang terbangun ()	0	1.67	1,293,010,000	0.83	286,415,000	15	3,159,795,720	33.33	9,188,737,760	31.67	8,168,890,338	82,50	22,096,848,818		
				Pembangunan Terminal	Persentase capaian bangunan terminal (%)		5	1,293,010,000	7.5	286,415,000	17.5	3,081,153,000	32.5	8,320,026,500	47.5	7,283,890,338	47.5	20,264,494,838		
				Pembangunan Halte	jumlah halte bus (unit)		0	-	0	-	2	78,642,720	2	80,911,260	2	85,000,000	6	244,553,980		

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Darat	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan yang diadakan (unit)		0	-	0	-	0	-	2	787,800,000	2	800,000,000	4	1,587,800,000		
				<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sekolah</b>	<b>Jumlah siswa siswi yang terangkut pertahunnya ()</b>	<b>1600</b>	<b>1600</b>	<b>-</b>	<b>1600</b>	<b>-</b>	<b>2400</b>	<b>4,444,000,000</b>	<b>2500</b>	<b>555,500,000</b>	<b>2600</b>	<b>1,455,500,000</b>	<b>2600</b>	<b>6,455,000,000</b>		
				Pengadaan Bus Sekolah	Jumlah bus sekolah (unit)		0	-	0	-	8	4,444,000,000	1	555,500,000	1	555,500,000	10	5,555,000,000		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Bus Sekolah	Jumlah bus sekolah yang laik jalan (unit)		0	-	0	-	0	-	0	-	30	900,000,000	30	900,000,000		
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ASDP</b>	<b>Persentase peningkatan sarana dan prasarana bidang ASDP ()</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>418,300,000</b>	<b>75</b>	<b>697,507,000</b>	<b>90</b>	<b>1,696,430,000</b>	<b>95</b>	<b>561,873,280</b>	<b>100</b>	<b>560,000,000</b>	<b>100</b>	<b>3,934,110,280</b>		
				Peningkatan fasilitas terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP)	jumlah fasilitas dermaga yang ditingkatkan kualitasnya (unit)		2	418,300,000	3	697,507,000	3	1,642,430,000	1	507,873,280	1	500,000,000	1	3,766,110,280		

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Fasilitas Terminal ASDP	Jumlah dermaga yang dipelihara (unit)		0	-	0	-	7	54,000,000	7	54,000,000	8	60,000,000	8	168,000,000		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Persentase peningkatan fasilitas perhubungan laut (%)	0	0	-	0	-	1	867,000,000	0	-	0	-	1	867,000,000		
				Pengadaan Kapal Pengawasan / Patroli	jumlah kapal pengawasan (unit)		0	-	0	-	1	867,000,000	0	-	0	-	1	867,000,000		
				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara	Persentase dokumen persyaratan pembangunan bandara (%)	0	0	-	0	5,540,000	40	954,450,000	30	954,450,000	30	1,500,000,000	100	3,414,440,000		
				Pembangunan Bandara	Persentase dokumen persyaratan pembangunan bandara (%)		0	-	0	5,540,000	40	954,450,000	30	954,450,000	30	1,500,000,000	100	3,414,440,000		
		Meningkatnya kepatuhan dalam berlalu lintas	Indeks kepatuhan berlalu lintas				79,56%	1,730,577,400	92,94%	1,107,991,300	94,68%	1,762,658,630	95,51%	1,093,840,500	97,03%	1,243,000,000	97,03%	6,938,067,830		

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan angkutan yang aman dan nyaman ( )	60	83,45	21,425,000	85,87	38,943,800	89,36	34,818,000	91,01	39,818,000	94,05	40,000,000	94,05	175,004,800		
				Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat uji yang diadakan (set)		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
				Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat PKB yang dipelihara (unit)		8	21,425,000	8	38,943,800	8	34,818,000	8	39,818,000	8	40,000,000	8	175,004,800		
				Program Peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan Lalu Lintas	Persentase angkutan yang layak ( )	60	83,45	1,575,590,400	85,87	869,426,500	89,36	1,452,242,430	91,01	718,750,000	94,05	823,000,000	94,05	5,439,009,330		
					Persentase angka kecelakaan kendaraan wajib uji		2,64		3,60		3,14		2,60		2,14		2,14			
				Sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan (kali)		0	-	0	-	4	38,840,000	4	38,840,000	4	45,000,000	4	122,680,000		

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Persentase fasilitas keselamatan jalan yang diadakan (%)		100	1,348,345,400	100	654,206,500	100	1,290,392,430	100	535,000,000	100	628,000,000	100	4,455,944,330		
				Penyusunan regulasi di bidang perhubungan darat	Jumlah regulasi yang disusun (regulasi)		1	108,720,000	1	58,640,000	0	-	0	-	0	-	2	167,360,000		
				Pengawasan dan pengendalian Angkutan	jumlah waktu pengawasan angkutan darat (kali)		48	118,525,000	48	156,580,000	48	123,010,000	48	144,910,000	48	150,000,000	48	693,025,000		
				<b>Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Penyeberangan</b>	<b>Persentase angka kecelakaan kapal ()</b>	<b>0</b>	<b>1,28</b>	<b>88,745,000</b>		<b>74,612,500</b>	<b>4,11</b>	<b>108,595,700</b>	<b>2,7</b>	<b>116,400,000</b>	<b>1,35</b>	<b>135,000,000</b>	<b>1,35</b>	<b>523,353,200</b>		
				Sosialisasi tentang keselamatan angkutan penyeberangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan (kali)		0	-	0	-	2	21,400,000	2	21,400,000	2	35,000,000	6	77,800,000		
				Pengendalian Disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah waktu pengawasan angkutan di danau (kali)		48	88,745,000	48	74,612,500	48	87,195,700	48	95,000,000	48	100,000,000	240	445,553,200		
				<b>Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Laut dan Udara</b>	<b>Persentase angka kecelakaan kapal ()</b>	<b>0</b>	<b>0,07</b>	<b>44,817,000</b>	<b>0,07</b>	<b>125,008,500</b>	<b>0,07</b>	<b>167,002,500</b>	<b>0,07</b>	<b>218,872,500</b>	<b>0,07</b>	<b>245,000,000</b>	<b>0,07</b>	<b>800,700,500</b>		

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Sosialisasi tentang keselamatan pelayaran	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan (kali)		2	14,840,000	2	20,810,000	2	21,400,000	2	21,400,000	2	30,000,000	10	108,450,000		
				Pengawasan angkutan laut	Jumlah kapal yang difasilitasi untuk memiliki dokumen pas kecil (unit)		600	29,977,000	600	29,947,000	600	38,282,500	600	47,362,500	600	55,000,000	600	200,569,000		
				Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah fasilitas pendukung pelabuhan lampia yang dibangun berdasarkan hasil koordinasi (unit)		0	-	3	74,251,500	1	107,320,000	0	150,110,000	0	160,000,000	4	491,681,500		
					Jumlah maskapai yang melayani penerbangan komersil di bandar udara sorowako berdasarkan hasil koordinasi (maskapai)		0		1		1		1		1		1			

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP			20	30,32	2,203,216,150	50,45	3,431,221,300	60,57	3,674,964,000	70,81	4,285,085,000	80,69	3,884,808,000	80,69	17,479,294,450		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)	85	90	1,775,193,650	90	2,038,401,300	95	2,378,962,000	95	2,927,533,000	95	3,219,558,000	95	12,339,647,950		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda (surat)		0	-	0	-	0	-	1200	3,150,000	1200	3,150,000	2400	6,300,000		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sda dan listrik yang terbayarkan (Rekening)		36	50,400,000	36	67,200,000	36	67,200,000	36	81,600,000	36	81,600,000	180	348,000,000		
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayarkan (org)		0	-	5	47,390,000	6	66,440,000	0	-	0	-	11	113,830,000		

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan (org,bln)		0	-	12	14,000,000	12	14,000,000	12	14,000,000	12	15,000,000	48	57,000,000		
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara (unit)		14	10,000,000	14	10,000,000	24	10,000,000	38	15,500,000	38	16,000,000	128	61,500,000		
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis)		20	1,000,000	20	1,000,000	70	5,950,000	70	5,950,000	70	5,950,000	250	19,850,000		
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan (jenis)		0	-	0	-	0	-	50	40,627,000	50	40,627,000	100	81,254,000		
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan (Jenis)		0	-	0	-	0	-	3	95,621,000	3	95,621,000	3	191,242,000		

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eksemplar)		60	6,060,000	60	6,060,000	60	6,060,000	60	6,540,000	60	6,540,000	300	31,260,000		
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis)		0	-	0	-	0	-	1	1,080,470,000	1	1,280,470,000	1	2,360,940,000		
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (kotak)		0	-	0	-	0	-	470	10,600,000	470	10,600,000	940	21,200,000		
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan (kali)		70	316,010,000	71	392,155,000	73	351,370,000	98	366,155,000	101	412,000,000	413	1,837,690,000		
				Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan (orang)		39	504,000,000	47	625,500,000	54	861,500,000	60	1,098,000,000	62	1,125,000,000	62	4,214,000,000		

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Penyediaan penunjang administrasi kesekretarian SKPD	Jumlah penunjang administrasi kesekretarian SKPD yang terpenuhi (jenis)		10	871,938,650	8	761,730,300	8	887,122,000	0	-	0	-	8	2,520,790,950		
				Monitoring dan Evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun (Dokumen)		4	15,785,000	4	30,000,000	4	30,360,000	4	30,360,000	4	32,000,000	20	138,505,000		
				Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (kali)		0	-	300	83,366,000	300	78,960,000	300	78,960,000	300	95,000,000	1200	336,286,000		
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi ()</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>391,252,500</b>	<b>95</b>	<b>1,319,820,000</b>	<b>95</b>	<b>1,212,932,000</b>	<b>95</b>	<b>1,106,132,000</b>	<b>95</b>	<b>370,180,000</b>	<b>95</b>	<b>4,400,316,500</b>		

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (unit)		0	-	4	202,370,000	1	367,200,000	0	-	0	-	5	569,570,000		
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit)		0	-	1	5,000,000	0	-	0	-	0	-	1	5,000,000		
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)		18	72,452,500	26	308,950,000	41	93,132,000	26	93,132,000	14	120,180,000	125	687,846,500		
				Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir	Jumlah taman/lapangan/fasilitas parkir yang dibangun (unit)		0	-	0	-	0	-	0	-	1	110,000,000	1	110,000,000		
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)		2	10,000,000	2	10,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	80,000,000		
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)		19	308,800,000	20	793,500,000	32	732,600,000	34	993,000,000	9	120,000,000	9	2,947,900,000		

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dan hari-hari tertentu ( )	100	100	29,920,000	100	21,000,000	100	14,500,000	100	176,850,000	100	210,500,000	100	452,770,000		
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian dinas (orang)		58	29,920,000	0	-	0	-	90	51,750,000	91	53,000,000	239	134,670,000		
				Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian pakaian kerja lapangan (orang)		0	-	30	21,000,000	0	-	90	125,100,000	91	135,000,000	211	281,100,000		
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian hari-hari tertentu (orang)		0	-	0	-	58	14,500,000	0	-	90	22,500,000	148	37,000,000		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya ( )	5	1	6,850,000	9	38,000,000	5	40,000,000	5	40,000,000	5	50,000,000	25	174,850,000		

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan (org)		1	6,850,000	9	38,000,000	5	40,000,000	5	40,000,000	5	50,000,000	25	174,850,000		
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	100	100	-	100	4,000,000	100	4,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	28,000,000		
				Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun (dok)		0	-	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	4	16,000,000		
				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (dokumen)		0	-	0	-	0	-	3	6,000,000	3	6,000,000	6	12,000,000		

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun ()	0	0	-	5	10,000,000	5	24,570,000	5	24,570,000	5	24,570,000	20	83,710,000		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (dokumen)		0	-	5	10,000,000	5	24,570,000	5	24,570,000	5	24,570,000	20	83,710,000		
<b>TOTAL</b>								<b>6,307,033,550</b>		<b>7,968,374,600</b>		<b>16,722,898,350</b>		<b>16,760,786,540</b>		<b>17,012,198,338</b>		<b>64,771,291,378</b>		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penyusunan indikator kinerja pada RENSTRA 2016 – 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur mengacu pada tujuan dan sasaran pada RPJMD Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016 -2021. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator tersebut harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Indikator kinerja utama merupakan indikator kinerja yang dimiliki suatu organisasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2021 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks kualitas infrastruktur transportasi	(%)	100	100	100	100	100
2	Indeks kepatuhan berlalu lintas	(%)	79,56	92,94	94,68	95,51	97,03

#### 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Urusa Perhubungan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD & RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD & RKPD mengamanatkan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja Kunci (IKK) seperti pada tabel 7.2 berikut :

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD 2016	2017	TARGET				Kondisi Akhir Kinerja Awal Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</i>									
A.	<i>Perhubungan</i>									
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	org	259,867	273,615	286,503	300,828	315,869	331,662	331,662	
2	Rasio ijin trayek	%	0.050%	0.007%	0.014%	0.015%	0.016%	0.017%	0.017%	
3	Jumlah uji kir angkutan umum	kendaraan	2,022	2,097	2,201	2,311	2,450	2,640	2,640	
4	Jumlah pelabuhan laut/udara / terminal bus									
	a. Pelabuhan laut	unit	3	3	0	0	0	0	3	
	b. Dermaga	unit	7	7	0	1	0	0	8	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD 2016	2017	TARGET				Kondisi Akhir Kinerja Awal Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	c. Bandar udara	unit	1	1	0	0	0	0	1	
	d. Terminal bis	unit	2	2	0	0	0	0	2	
5	Persentase layanan angkutan darat	%	2.160%	2.074%	2.074%	2.074%	2.059%	2.059%	2.059%	
	Angkutan darat	unit	2423	2442	2564	2692	2807	2947	2947	
6	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	0.36%	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%	
7	Pemasangan Rambu - rambu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	77.97%	81.23%	81.23%	81.23%	81.23%	81.23%	81.23%	
9	Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum	org, brg	510,393	504,365	536,294	563,108	591,263	620,826	620,826	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD 2016	2017	TARGET				Kondisi Akhir Kinerja Awal Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Jumlah orang melalui dermaga / bandara / terminal pertahun	org	259,867	273,615	286,503	300,828	315,869	331,662	331,662	
	Jumlah barang melalui dermaga / bandara / terminal pertahun	brg	250,526	230,750	249,791	262,280	275,394	289,164	289,164	

## BAB VIII

### PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Dinas Perhubungan ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan selama periode 2016-2021.

RENSTRA PD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. RENSTRA ini merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Perhubungan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan rencana tahunan Dinas Perhubungan dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

RENSTRA Dinas Perhubungan diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Bupati Luwu Timur, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Perhubungan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Malili, September 2020

Kepala Dinas



Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650406 198603 1 017